Kontroversi Asuransi dalam Islam : Telaah Pendapat Ulama dan Implementasi Asuransi Syariah di Indonesia

Risma Hermawati Apriliani ¹

Rivana ²

Azmia Siti Munasifah ³

Seli Saelurrohmah Syam ^{*4}

Joni Ahmad Mughni ⁵

Raihani Fauziah ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002001@student.unsil.ac.id¹, 231002009@student.unsil.ac.id²,

231002022@student.unsil.ac.id³, 231002035@student.unsil.ac.id⁴, joni@unsil.ac.id⁵,

raihanifauziah@unsil.ac.id⁶,

Abstrak

Asuransi merupakan salah satu instrumen keuangan yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko kerugian yang tidak terduga. Dalam praktiknya, asuransi konvensional kerap diperdebatkan karena dinilai mengandung unsur riba, gharar, dan maisir yang bertentangan dengan prinsip syariah. Hal tersebut mendorong lahirnya asuransi syariah (takaful) yang berlandaskan pada nilai ta'awun (tolong-menolong) dan takaful (saling melindungi) antar peserta, sehingga berbeda secara mendasar dengan konsep konvensional. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep asuransi syariah dengan menelaah pendapat ulama, konsep at-ta'min, dasar hukum, serta prinsip-prinsip yang digunakan dalam praktiknya. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan ulama: sebagian menolak asuransi karena dinilai sarat spekulasi dan riba, sebagian membolehkan dengan ketentuan tertentu, sedangkan pandangan moderat membedakan antara asuransi sosial dan komersial. Asuransi syariah sendiri didasarkan pada nilai tauhid, keadilan, kerjasama, serta larangan riba, gharar, dan maisir. Al-Qur'an dan hadis memperkuat legitimasi keberadaan asuransi syariah sebagai wujud perlindungan sekaligus solidaritas sosial.

Kata kunci: Asuransi syariah, ulama, ta'awun, riba, gharar.

Abstract

Insurance is one of the financial instruments that functions to provide protection against various unexpected risks and losses. In practice, conventional insurance is often debated because it is considered to contain elements of riba (usury), gharar (uncertainty), and maisir (gambling), which contradict Islamic principles. This situation has encouraged the emergence of Islamic insurance (takaful), which is based on the values of ta'awun (mutual help) and takaful (mutual protection) among participants, making it fundamentally different from the conventional concept. This study aims to examine the concept of Islamic insurance by analyzing scholars' opinions, the concept of at-ta'min, its legal basis, and the principles applied in its practice. The findings show that scholars hold different views: some reject insurance because it is deemed to involve speculation and riba, others permit it under certain conditions, while moderate views distinguish between social and commercial insurance. Islamic insurance itself is based on the values of tawhid (oneness of God), justice, cooperation, and the prohibition of riba, gharar, and maisir. The Qur'an and Hadith further strengthen the legitimacy of Islamic insurance as a form of protection as well as social solidarity.

Keywords: Islamic insurance, scholars, ta'awun, riba, gharar

PENDAHULUAN

Asuransi merupakan salah satu instrumen keuangan modern yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko serta musibah yang tidak terduga. Di Indonesia, terdapat dua jenis asuransi yang berkembang, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional sering kali menuai kritik karena dianggap mengandung unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, lahirlah konsep asuransi syariah sebagai alternatif yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah, terutama nilai ta'awun (tolong-menolong) dan takaful (saling melindungi) antar peserta. Perdebatan

mengenai keabsahan asuransi dalam perspektif Islam menimbulkan ragam pandangan ulama, baik yang mengharamkan maupun yang membolehkan dengan syarat tertentu. (Rahman, 2011)

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia semakin pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya instrumen keuangan yang sesuai syariat. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menjadi landasan hukum dalam praktik industri ini. Dalam fatwa tersebut, ditegaskan bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong melalui investasi aset atau tabarru' yang sesuai dengan akad syariah. Dengan adanya regulasi tersebut, industri asuransi syariah mendapat legitimasi formal dan menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan Islam di Indonesia. (Pertwi & Abidah, 2021)

Namun demikian, tantangan besar masih dihadapi, baik dari sisi pemahaman masyarakat maupun implementasi prinsip syariah dalam praktik bisnis asuransi. Sebagian kalangan menilai bahwa asuransi, bahkan yang berbasis syariah sekalipun, masih memiliki potensi mengandung unsur gharar atau spekulasi yang dilarang. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai pendapat ulama, konsep at-ta'min, dalil syar'i, hingga perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional menjadi sangat penting untuk memberikan kejelasan hukum dan praktik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Wati, 2023)

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan berjenis literature review. Literature review merupakan proses pengumpulan informasi atau karya tulis yang bersifat kepustakaan. Pengumpulan informasi dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti jurnal, buku, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapat Ulama yang Mengharamkan dan Membolehkan

Dalam islam, keberadaan asuransi syariah sudah lama menjadi perdebatan. Dari diskusi panjang tersebut terlahirlah konsep asuransi syariah atau takaful. Secara tujuan, takaful dan asuransi konvensional sama-sama ingin memberikan perlindungan, tetapi praktik dan konsepnya memiliki perbedaan. Pembahasan mengenai asuransi syariah dalam islam selalu menarik karena menyangkut akad, muamalah, serta hukum halal-haramnya. Para ulama berpendapat. Kelompok ini menilai bahwa seluruh bentuk asuransi, termasuk asuransi jiwa, hukumnya tidak diperbolehkan. Tokoh tokoh yang berpendapat mengharamkan asuransi yaitu, Sayyid Sabiq, 'Abd Allah al-Qalqili (Mufti Yordania), Yusuf Qaradawi, dan Muhammad Bakhit al-Mu;thi (Mufti Mesir). Alasan utama mereka adalah

- Mengandung unsur judi (maisir). Dalam asuransi, peserta membayar premi tanpa kepastian adalah ia akan menerima manfaat atau tidak. Jika terjadi musibah, peserta bisa memperoleh uang dalam jumlah besar meskipun hanya membayar premi kecil. Sebaliknya, jika tidak terjadi musibah, peserta bisa tidak mendapat apa-apa. Pola seperti ini dinilai mirip dengan perjudian.
- Ada unsur gharar (ketidakjelasan). Ketidakpastian besar dalam akad asuransi membuatnya dianggap cacat secara syariat. Misalnya, tidak jelas berapa banyak premi yang akan diterima kembali, kapan waktunya, atau dalam kondisi apa saja klaim bisa cair.
- Mengandung riba. Dalam beberapa produk asuransi, uang premi diinvestasikan dalam instrumen berbunga atau menghasilkan keuntungan yang sifatnya riba.
- Mengandung unsur penipuan. Misalnya, jika peserta berhenti membayar premi di tengah jalan, uang yang telah disetorkan bisa hangus. Hal ini dinilai merugikan salah satu pihak.
- Premi digunakan untuk hal yang tidak sesuai syariat. Ada kemungkinan dana peserta diputar dalam usaha-usaha yang mengandung riba, perjudian, atau hal yang diharamkan.
- Akad asuransi tidak sah. Asuransi dianggap menyerupai transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat sah akad dalam Islam. (Hannan et al., 2021)

Kelompok kedua berpendapat bahwa asuransi pada dasarnya boleh dilakukan, selama tidak melanggar prinsip syariat. Tokoh-tokoh yang termasuk ke dalam kelompok ini di antaranya adalah Abd. Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad al-Zarqa, dan Muhammad Yusuf Musa. Mereka mengemukakan beberapa alasan:

- Tidak ada dalil khusus yang melarang. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak terdapat ayat maupun hadis yang secara tegas mengharamkan asuransi. Karena itu, asuransi dipandang boleh selama membawa manfaat dan tidak menimbulkan mudarat.
- Berdasarkan akad kerelaan. Asuransi didirikan atas kesepakatan antara dua pihak yang sama-sama rela dengan isi akadnya. Selama tidak ada paksaan dan masing-masing pihak setuju, maka akad dianggap sah.
- Mengandung semangat tolong-menolong. Hakikat dari asuransi adalah saling menanggung risiko. Peserta yang mengalami musibah akan dibantu oleh dana kolektif yang dikumpulkan dari semua anggota. Konsep ini sejalan dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dalam Islam.
- Dana premi bermanfaat. Premi yang terkumpul tidak hanya disimpan, tetapi juga bisa diinvestasikan untuk hal-hal produktif, misalnya pembangunan atau kegiatan usaha halal.
- Bisa dipandang sebagai bentuk syirkah ta'awuniyah (koperasi). Artinya, semua peserta bergabung dalam satu wadah untuk saling melindungi dan menanggung risiko.
- Dikiaskan dengan sistem pensiun. Dalam pensiun, seseorang juga membayar iuran rutin untuk kemudian mendapatkan manfaat di masa depan. Sistem ini sudah lama dipraktikkan dan diterima masyarakat Muslim. (Tgk. Abdullah, MA & Afyan, 2022)

Dengan alasan-alasan tersebut, kelompok kedua menilai bahwa asuransi tidak bertentangan dengan syariat, bahkan bisa menjadi instrumen sosial-ekonomi yang bermanfaat.

Kelompok ketiga asuransi sosial, pendapat ulama ini yakni Muhammad Abu Zahrah (guru besar Hukum Islam pada Universitas Kairo) beliau mengambil posisi di tengah-tengah. Beliau tidak mengharamkan secara mutlak, namun juga tidak sepenuhnya membolehkan. Asuransi dipandang sebagai perkara syubhat (abu-abu). Alasan mereka adalah:

- Tidak ada dalil tegas. Baik yang mendukung maupun melarang, semuanya masih bersifat interpretasi. Karena itu, asuransi berada di wilayah abu-abu.
- Membedakan jenis asuransi. Asuransi yang bersifat komersial dianggap lebih dekat dengan keharaman karena mengandung unsur bisnis dan spekulasi. Sementara itu, asuransi yang sifatnya sosial, misalnya untuk saling membantu tanpa orientasi keuntungan, lebih cenderung diperbolehkan.

Kelompok ini mengingatkan bahwa karena tidak ada dalil qat'i (pasti), maka hukum asuransi sangat bergantung pada praktiknya: apakah lebih banyak mengandung maslahat (kebaikan) atau mudarat. Dari ketiga pandangan di atas bisa dilihat bahwa perbedaan ulama lebih banyak disebabkan oleh cara mereka memandang akad, unsur gharar, maisir, riba, serta orientasi asuransi (sosial atau komersial). (Syakir Sula, 2004)

Konsep At-Ta'min

Dalam Bahasa arab asuransi disebut "*at-ta'min*", pihak yang penanggung asuransi disebut "*mu'ammin*", sedangkan pihak yang bertanggung disebut "*mu'amman lahu* atau *must'amin*". "*At-ta'min*" berasal dari kata amana yang berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Quraisy/106:4 yang berbunyi. (Badriya Hisniati et al., 2023)

﴿ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾

Terjemah :

Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (Q.S. Al-Quraisy/106:4).

Men-*ta'aminkan* sesuatu, artinya seseorang membayar atau menyerahkan sejumlah uang sebagai cicilan agar ia atau ahli warisnya bisa mendapatkan sejumlah uang sebagai ganti rugi terhadap hartanya yang hilang tentunya harus sesuai dengan kesepakatan bersama, atau dengan kata lain seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya atau mobilnya.

Adapun tujuan dalam islam yang menjadi kebutuhan mendasar, yaitu *al-kifayah* (kecukupan) dan *al-amnu* (keamanan). Sebagaimana firman allah "Dialah allah yang mengamankan mereka dari ketakutan", sehingga Sebagian masyarakat berpendapat bahwa bebas dari rasa lapar merupakan bentuk keamanan. Hal ini disebut *al-amnu al-qidza'i* (aman konsumsi). Sehingga prinsip tersebut, di dalam islam mengcuh pada umat yang mencari rasa aman baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Seperti dalam nasihat Rasulullah saw. Untuk mendedekahkan sepertiga harta yang di punya dan selebihnya diberikan untuk keluarganya. (Syaefullah et al., 2019)

Dasar hukum asuransi syariah adalah bersumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungangan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu al- Qur'an dan Sunnah Rasul, serta pendapat Ulama atau Fuqaha yang tertuang dalam karya-karyanya.

Secara eksplisit tidak ada satu ayat pun dalam al-Qur'an yang menyebutkn istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik dalam istilah "at-ta'min" ataupun "at-takaful". Akan tetapi dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan mengenai konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Mengenai ayat-ayat tersebut dapat dikasifikasikan menjadi empat macam kategori yaitu: (Tila et al., 2019)

1. Perintah Allah untuk mempersiapkan masa depan QS. Al-Hasyr: 18 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

2. Perintah Allah untuk saling tolong-menolong dan bekerjasama QS. Al-Maidah: 2, yang artinya:

"Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

3. Perintah allah untuk saling melindungi antar sesame Ketika menghadapi kesusahan QS. Al-Baqarah: 126, yang artinya:

"Dan Ketika Ibrahim berdo'a, "Ya Tuhanku jadikanlah negeri ini yang aman Sentosa (selamat)."

4. Perintah Allah untuk tawakal dan optimis dalam berusaha QS. Al-Taghaabun: 11, yang artinya:

"Tidak ada sesuatu musibahpun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin allah"

5. Penghargaan allah terhadap perbuatan mulia yang dilakukan manusia terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 261, yang artinya:

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulis serratus biji. Dan allah mahaluas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui."

Adapun prinsip-prinsip *at-ta'min* (asuransi) syariah yang pada dasarnya ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep

ekonomika secara komprehensif dan bersifat umum. Hal ini disebabkan karena kajian asuransi syariah merupakan turunan dari konsep ekonomika islami.

Begitu juga dengan asuransi, harus dibangun dengan pondasi serta prinsip dasar yang kuat dan kokoh. Menurut Hasan Ali (2004: 135) dalam hal ini, prinsip dasar asuransi syariah ada sembilan macam yaitu tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, larangan riba dan larangan gharar yang penjelasannya sebagai berikut. (Hannan et al., 2021)

a. Tauhid (*unity*)

Prinsip tauhid (*unity*) ini adalah dasar utama dari setiap bangunan yang ada dalam Syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Yang artinya bahwa dalam setiap gerak ataupun langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. (Hannan et al., 2021)

Manusia dengan atribut yang melekat pada dirinya adalah fenomena sendiri yang realitanya tidak dapat dipisahkan dari penciptanya (*sang khaliq*). Sehingga dalam tingkatan tertentu dapat dipahami bahwa semua gerak yang ada di alam semesta merupakan gerak dari Allah SWT. Dalam hal ini Allah SWT. Berfirman dalam Qs Al-Hadid (57): 4

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa Kemudian dia bersemayam di atas ‘arsy dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. dan Dia bersamamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Hadid)

b. Keadilan (*justice*)

Prinsip kedua dalam berasuransi yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Pertama, nasabah asuransi harus memposisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (*premi*) dalam jumlah tertentu pada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, Perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai Lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah.

Disisi lain keuntungan (*profit*) yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi serta hasil dari investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yang telah disepakati sejak awal. Jika nasabah yang telah menyepakati antara kedua belah pihak 20:60, maka realitanya pembagian keuntungan juga harus mengacu pada keuntungan tersebut.

c. Tolong-menolong (*ta'awun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu serta meringankan beban temannya yang pada suatu Ketika mendapatkan musibah ataupun kerugian. (Hannan et al., 2021)

Dalam hal ini Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya QS. Al-Maidah(5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al- Maidah:2)

Praktik tolong-menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk bisnis asuransi, hal ini sejalan dengan Sabda Rasulullah Saw yang ditulis dalam kitab Shohih Bukhori (1999:138:3) Dari Abu Musa ra, Ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Alà’ telah menceritakan kepada kami Hammad bin Usamah dari Buraid dari Abi Burdah dari Abi Musa berkata: Nabi Shallallahu ‘Alahi Wasallam bersabda: Sesungguhnya orang-orang Asy’ariy jika mereka berperang atau harta kebutuhan keluarga mereka di Madinah menipis maka mereka mengumpulkan apa saja milik mereka pada satu pakaian kemudian mereka membagi rata diantara mereka pada tiap masing-masing, maka mereka adalah bagian dariku dan aku bagian dari mereka*”.

d. Kerja sama (*cooperation*)

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari Khaliqnya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat menggunakan konsep *mudharabah* atau *musyarakah*. Konsep *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika Islami dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan.

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang mengharuskan pemilik modal (nasabah) menyerahkan sejumlah dana (*premi*) kepada perusahaan asuransi (*mudharib*) untuk dikelola. Dana yang terkumpul oleh perusahaan asuransi diinvestasikan agar memperoleh keuntungan yang nantinya akan dibagi antara perusahaan dan nasabah asuransi. Jika akadnya menyebutkan pembagian nisbah keuntungan antara kedua pihak 70:30, yaitu 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan, maka pembagian profit dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan juga harus mengacu pada ketentuan akad tersebut.

Sedangkan akad *musyarakah* dapat terwujud antara nasabah dan perusahaan asuransi, jika kedua pihak bekerjasama dengan sama-sama menyerahkan modalnya untuk diinvestasikan pada bidang-bidang yang menguntungkan. Keuntungan (*profit*) yang diperoleh dari investasi dibagi sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati. Akan tetapi, menurut Wahbah Zuhaili (1985: Juz 4:719-728.) Tidak sah memposisikan *al-ta’min* dari segi kerjasama bagi hasil (*shirkat al-mudlarabah*), yakni pemilik modal dengan pengelola dengan sistem bagi hasil. Karena akan muncul ketidakadilan bagi *mu’amman* lahu (pihak bertanggung) disebabkan segala keputusan ada di tangan *mu’ammin* (penanggung) serta *mu’amman* lalu akan rugi jika tidak mendapatkan jaminan. Kecuali *shirkat al-mudlarabah* dalam *al-ta’min* menanamkan konsep keuntungan dibagi antara pemodal (*shahib al-mal*) dan pengelola 1/4 atau 1/3.

e. Amanah (*trustworthy*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar

bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor publik. Memerintahkan jujur dan amanah ini sudah Allah tegaskan didalam firman-Nya, (QS. Al-Maidah: 01)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. (QS. Al-Maidah: 01)

Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (*premi*) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Jika seorang nasabah asuransi tidak memberikan informasi yang benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum.(Hannan et al., 2021)

f. Kerelaan (*al-ridha*)

Prinsip kerelaan dalam ekonomika Islami berdasar pada firman Allah SWT. berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. anNisa:29)

Ayat ini menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam setiap melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian akad. Sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan.

g. Tidak mengandung riba

Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara umum terdapat benang merah dalam menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Wahbah Zuhaili (1985: Juz 4:719-728) membagi riba menjadi empat, yaitu riba qardh, riba jahiliah, riba fadhil, dan riba nasi'ah. Dalam setiap transaksi, seorang Muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan, salah satu adalah riba. Firman Allah SWT. :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS Ali-Imran: 130).

h. Tidak mengandung perjudian (*qimar*)

Allah Swt. telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur judi (*maisir*). (Hannan et al., 2021) Firman Allah Swt. dalam QS. Al-Maidah (5): 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. al-Maidah: 90).

Syafi'i Antonio (2004:186) mengatakan bahwa unsur maisir (judi) artinya adalah salah satu pihak yang untung, namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebabsebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, dimana untung rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

- i. Tidak mengandung gharar (ketidak pastian)

Menganai larangan transaksi tidak boleh ada unsur gharar ialah ditegaskan oleh sabda Rasulullah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَبِعْ بِيٍّ - عِ
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

"Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW. telah melarang jual beli alhashah dan jual beli gharar". (HR. Muslim)

Gharar dalam pengertian bahasa adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Wahbah alZuhaili memberi pengertian tentang *gharar* sebagai *al-khatar* dan *al-taghrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Oleh karena itu, dikatakan ad-dunya *mata'ul ghuruur* artinya dunia adalah kesenangan yang menipu.

Sesuai dengan syarat-syarat akad pertukaran, maka harus jelas berapa pembayaran premi dan berapa uang pertanggungan yang akan diterima. Masalah hukum syaria'ah disini muncul karena kita tidak bisa menentukan secara tepat jumlah premi yang akan dibayarkan, sekalipun syarat-syarat lainnya, penjual, pembeli, ijab kabul, dan jumlah uang pertanggungan (barang) dapat dihitung. Jumlah premi yang akan dibayarkan amat tergantung pada takdir, tahun berapa kita meninggal atau mungkin sampai akhir kontrak kita tetap hidup. Disinilah gharar terjadi.

Oleh karena itu Muhammad Syakir Sula (2004:174), dalam mekanisme dana di asuransi syariah, *premi* yang dibayarkan peserta dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'*. Pada rekening *tabarru'* inilah ditampung semua dana *tabarru'* peserta sebagai dana tolong menolong atau dana kebajikan, yang jumlahnya sekitar 5%-10% dari premi pertama (tergantung usia). Selanjutnya, dari dana ini pula klaim-klaim peserta dibayarkan apabila ada di antara peserta yang meninggal atau mengambil nilai tunai.

Dalil Al-Qur'an

Asuransi syariah pada dasarnya adalah asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah. Hukum syariah dipastikan bersumber kepada Al-Quran dan Alhadis. Namun dalam praktiknya, Al-Quran dan Alhadis ini tidak akan bisa dipahami apalagi diterapkan begitu saja tanpa bantuan para ahli hukum Islam atau lainnya apa pun sebutan dalam julukan yang diberikan kepadanya. (Tila et al., 2019)

Asuransi dalam perspektif Islam menjadi salah satu instrumen keuangan yang masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama menolak praktik asuransi konvensional karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maisir (spekulasi/untung-untungan), dan riba (bunga). Namun, sebagian ulama kemudian merumuskan konsep asuransi syariah (ta'min, takaful, atau tadhmun) yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan saling melindungi (takaful). (Wati, 2023)

1. Dalil Al-Quran

Dasar syar'i yang sering dijadikan oleh para ulama dalam membolehkan asuransi syariah adalah perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan yang terdapat dalam QS. Al-Maidah [5]:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة / ٢:٥)

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu (orang-orang beriman) atas (prinsip) kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu saling tolong menolong atas (dasar) dosa dan permusuhan (Q.S. al-Ma'idah (5): 2) Ayat ini menjadi dasar prinsip tolong-menolong yang melandasi asuransi syariah, yaitu kerja sama dalam kebaikan untuk melindungi dari risiko yang tidak terduga.

2. Al-Hadis

Hadis riwayat Muslim : “Siapa yang melepaskan seorang muslim dari suatu kesulitan di dunia ini, maka Allah akan melepaskan kesulitan yang bersangkutan di hari kiamat kelak; dan Allah senantiasa menolong hamba Nya selama hamba-Nya itu (suka) menolong saudara (seagamanya). (Hadis riwayat Imam Muslim dari Nu'man bin Basyir).

Berdasarkan alasan diatas Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan beberapa fatwa tentang asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah dan menjadi pedoman lembaga asuransi dalam menerapkan sistem asuransi yang sesuai dengan Islam. Mengenai pedoman tersebut telah diatur dalam Fatwa DSN yaitu fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan asuransi syariah (ta'min, takaful, tadamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. (Pertiwi & Abidah, 2021)

Asuransi menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian besar ulama mengharamkan asuransi konvensional karena dinilai mengandung gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), dan riba (bunga), yang dilarang dalam Al Qur'an dan hadis. Hal ini didasarkan pada QS. Al-Mā'idah [5]: 90 tentang larangan judi, QS. Al-Baqarah [2]: 275 tentang larangan riba, serta hadis Nabi SAW yang melarang transaksi gharar (HR. Muslim, No. 1513). Namun, ulama kontemporer memperbolehkan bentuk asuransi syariah yang berprinsip tabarru' (hibah) dan ta'awun (tolong-menolong), sebagaimana diperintahkan dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 2. Asuransi syariah dipandang lebih adil karena berlandaskan solidaritas antar peserta dan bebas dari riba. Majma' al-Fiqh al-Islami (1985) dan DSN-MUI (Fatwa No. 21/2001) juga menegaskan bahwa asuransi syariah diperbolehkan. Menurut Aravik (2016), perbedaan utama terletak pada mekanisme: asuransi konvensional sarat spekulasi, sedangkan asuransi syariah didesain untuk saling melindungi sesuai prinsip syariat. (Wati, 2023)

Apakah Asuransi Bertentangan Dengan Takdir, Sama Dengan Judi dan Cacat Secara Syar'i

Asuransi tidak dipandang bertentangan dengan takdir menurut ajaran Islam maupun kajian ilmiah. Takdir berupa musibah, kecelakaan, atau kematian memang merupakan ketetapan Allah yang tidak bisa dihindari, tetapi manusia tetap diwajibkan untuk berusaha serta mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan di masa depan. Salah satu bentuk ikhtiar tersebut adalah melalui asuransi yang berfungsi sebagai proteksi atas risiko yang dapat terjadi. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Hasyr [59]: 18 yang menegaskan pentingnya memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk hari esok dengan tetap bertakwa kepada-Nya. Oleh karena itu, keberadaan asuransi dapat dipahami sebagai usaha manusia dalam menghadapi takdir, tanpa berarti menolak ketentuan Allah. Asuransi syariah dibangun atas prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan tanggung jawab bersama, terbebas dari riba, *gharar*, dan *maysir*, sehingga dianggap selaras dengan ajaran Islam sebagai bentuk ikhtiar dan perlindungan finansial terhadap risiko. (Hardyanti, 2019)

Menurut jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali berpendapat

bahwa unsur penting dari *al-maisir* (perjudian) adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan sebab bagi haramnya *maisir* tersebut. Oleh karena itu *maisir* termasuk salah satu perbuatan jarimah yaitu perbuatan terlarang yang diancam dengan *ta'zir* yang berupa hukuman badan yang dikenakan atas terhukum karena melakukan perbuatan terlarang. (Raja et al., 2024)

Masalah asuransi dalam ajaran Islam merupakan isu *ijtihadiah*, karena tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Para imam mujtahid seperti Abu Hanifah dan Imam Malik tidak memberikan fatwa mengenai asuransi, yang baru muncul di dunia Timur pada abad ke-19 dan di Barat sejak abad ke-14.

Terdapat dua pendapat di kalangan ulama mengenai hukum asuransi: (Sintha Putri & Agustianto, 2021)s

1. Mengharamkan asuransi: Pendapat ini, diungkapkan oleh ulama seperti Sayyid Sabiq dan Al-Qardhawi, berargumen bahwa asuransi mirip judi, mengandung unsur ketidakpastian dan riba, serta mengeksploitasi pemegang polis.
2. Membolehkan semua bentuk asuransi: Pendapat ini diusulkan oleh Abdul Wahab Khalaf dan lainnya, yang beralasan bahwa tidak ada larangan dalam Al-Quran atau Hadis, bahwa kedua pihak melakukan perjanjian dengan rela, serta asuransi memberikan manfaat bagi masyarakat dan dapat diinvestasikan untuk proyek produktif.

Kedua pendapat ini mencerminkan pandangan yang berbeda mengenai kemaslahatan dan tanggung jawab dalam praktik asuransi.

Pandangan bahwa asuransi sama dengan judi kurang tepat. Judi adalah permainan yang menguntungkan pihak luar, sedangkan asuransi adalah kerja sama yang memiliki manfaat sosial dan mendukung pertumbuhan peradaban. Judi menimbulkan risiko, sementara asuransi mengurangi risiko dalam masyarakat. Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum asuransi muncul karena sifatnya yang *ijtihad*. Beberapa ulama membenarkan, sementara yang lain tidak. Menurut kaidah "الأصل في المعاملة الإباحة إلا ما يمنعه الشرع," hukum asuransi pada dasarnya mubah, asalkan tidak mengandung unsur terlarang dalam syariat Islam, seperti riba, *gharar*, spekulasi, dan ketidakadilan. (Pusvisasari, 2023)

Akad asuransi cacat secara syar'i adalah akad asuransi yang menurut hukum Islam dinilai cacat atau tidak sah karena mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), yang menyebabkan akad tersebut tidak memenuhi syarat sah dalam syariat Islam. Dalam konteks asuransi konvensional, akad jual beli atau pertukaran harta yang diterapkan seringkali mengalami cacat karena tidak jelas berapa besar pembayaran premi atau klaim yang akan diterima, sehingga terjadi *gharar*. *Gharar* ini muncul karena adanya ketidakpastian jumlah premi dan manfaat yang akan diterima, serta kapan musibah atau kecacatan terjadi, yang hanya diketahui oleh Allah SWT. Para ulama berpendapat akad tersebut cacat karena tidak terpenuhi rukun akad dengan jelas. (Ramadhan, 2022b)

Sebagai alternatif, asuransi syariah menggunakan akad *tabarru* (akad tolong-menolong antar peserta) yang bebas dari unsur *gharar* dan riba. Dalam akad *tabarru* peserta saling berjanji menyisihkan dana sebagai hibah (kontribusi) yang dikelola secara bersama untuk saling menolong apabila ada peserta yang mengalami musibah, termasuk cacat. Dana ini bukan menjadi milik perusahaan, melainkan milik bersama peserta (*shahib al-mal*). (Ramadhan, 2022a)

Selain akad *tabarru'*, skema asuransi syariah juga menerapkan prinsip *risk-sharing* yaitu pembagian risiko bersama antar peserta. Jika ada surplus dana setelah dikurangi klaim dan biaya operasional, surplus ini akan dibagi secara adil antara peserta dan perusahaan asuransi sesuai akad yang sudah disepakati, berbeda dengan asuransi konvensional yang sepenuhnya menjadi milik perusahaan. (Jairin, 2021) Konsep *risk-sharing* ini menghilangkan unsur ketidakpastian (*gharar*), perjudian (*maisir*), dan riba, serta menekankan pada prinsip tolong-menolong (*takaful/ta'awun*) yang merupakan pondasi utama asuransi syariah. Prinsip ini juga

memberikan rasa solidaritas dan persaudaraan di antara peserta asuransi yang saling membantu keuangan saat mengalami risiko tanpa unsur spekulasi. (Marissa & Rahma, 2025)

KESIMPULAN

Asuransi sebagai instrumen keuangan berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap risiko yang tidak terduga. Di Indonesia, terdapat dua jenis asuransi, yaitu konvensional dan syariah, yang memunculkan perbedaan pandangan ulama. Sebagian mengharamkan karena mengandung unsur gharar, riba, dan maisir, sementara yang lain memperbolehkan dengan alasan tidak ada larangan tegas serta pentingnya prinsip tolong-menolong. Dalam konteks syariah, asuransi dinilai sah apabila menggunakan akad tabarru' yang menekankan solidaritas, kejelasan, serta bebas dari unsur yang bertentangan dengan Islam. Perbedaan pendapat ulama menunjukkan kompleksitas hukum asuransi, namun yang utama adalah penerapan nilai keadilan dan tolong-menolong dalam praktiknya, terutama pada asuransi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badriya Hisniati, S., D Priyadi, M., Herol, Rivaldino, & Ulum, M. (2023). Hukum Ekonomi Syariah. In *Jurnal Pelita Nusa* (Vol. 3, Issue 1). <https://doi.org/10.61612/jpn.v3i1.33>
- Hannan, A., Muzakki, A., Islam, U., Hasan, Z., & Probolinggo, G. (2021). *Asuransi (Al-Ta'amin) Dalam Pandangan Hukum Islam*. 08(01), 84–101.
- Hardyanti, N. S. (2019). Otentisitas Penerapan Asuransi Syariah Di Indonesia. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(1), 1–22. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i1.4870>
- Jairin. (2021). *627-Article Text-1757-1-10-20210703 (1)*. 5(1), 13–31.
- Marissa, S., & Rahma, T. I. F. (2025). Perbandingan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional: Analisis dari Perspektif Ekonomi Islam. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(2), 4356–4360. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i2.7468>
- Pertiwi, L., & Abidah, A. (2021). Eksistensi Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 Pada Asuransi Jiwa Syariah di PT. Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 1(1), 61–73. <https://doi.org/10.21154/invest.v1i1.2567>
- Pusvisasari, L. (2023). Hukum Asuransi Tinjauan Para Ulama Fiqih. *Mashlahah*, 2(2), 37–50. <https://doi.org/10.62824/jgqwx727>
- Rahman, M. F. (2011). Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 157–176.
- Raja, R., Nasution, B. A., & ... (2024). Judi Online Dan Hukum Pidana Islam: Implikasi Hukum Dan Moralitas. *Jurnal Sahabat ISNU ...*, 1, 206–213.
- Ramadhan, T. (2022a). Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah. *Sahaja*, 1(1), 45–56. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i1.12>
- Ramadhan, T. (2022b). AKAD-AKAD DALAM ASURANSI SYARIAH Taufiq Ramadhan 1 Institut Ilmu Alqur'an (IIQ) Jakarta 1 Ema. *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 1(1), 45–55.
- Sintha Putri, F., & Agustianto, M. andre. (2021). Asuransi dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(1), 55–72. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i1.229>
- Syaefullah, H., Sobhan, M., Koswara, I., Ihsan, M., Sa'adah, K., & Rusli, R. (2019). *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah* (Issue November).
- Syakir Sula, M. (2004). *Asuransi Syariah: life and general: konsep dan sistem operasional*. 95, 1–769.
- Tgk. Abdullah, MA, & Afyan, M. (2022). Hukum Asuransi (Ta'Min) Dalam Perspektif Madzhab Syāfi'ī. *Jurnal Al-Nadhair*, 1(2), 34–48. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.11>
- Tila, L., Mukhsinun, M., & Fursotun, U. (2019). Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Labatila*, 2(01), 53–73. <https://doi.org/10.33507/lab.v2i01.107>

Wati, R. (2023). Asuransi Dalam Perspektif Islam. *Muadalah: Jurnal Hukum*, 3(1), 1-13.
<https://doi.org/10.47945/muadalah.v3i1.927>